Kemendag Dan KKP Optimalkan Sistem Resi Gudang Untuk Ekspor Produk Perikanan

Tanggal	: Sabtu , 28 November 2020
Media	: komoditi-indonesia.com
Halaman	: 1
Wartawan	: Ivan
Muatan Berita	: Positif
Narasumber	: Agus Suparmanto *(Menteri Perdagangan)*, Sidharta Utama *(Kepala Bappebti)*, Artati Widiati *(Direktur Jenderal Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan KKP)*
Rubrik	: Resi
Topik	: Resi Gudang

Home > Resi

Kemendag dan KKP Optimalkan Sistem Resi Gudang Untuk Ekspor Produk Perikanan



Optimalkan Pemanfaatan SRG di Sektor Perikanan, Kementerian Perdagangan Bersama Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) Lepas Ekspor Ikan Tuna ke Korea Selatan Bali, 27 November 2020 –

KOMODITI-INDONESIA.COM, Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti) Kementerian Perdagangan bersama Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) meresmikan implementasi SRG ikan sekaligus melakukan pelepasan ekspor dari gudang sistem resi gudang (SRG) di Benoa, Denpasar, Bali ke Korea Selatan, Jumat (27/11). Produk ikan yang diekspor adalah ikan tuna, baby tuna, lemuru, dan cakalang dengan volume mencapai 15 ton.

READ MORE

Sistem Informasi Gudang SRG Yang Cepat dan Terintegrasi Melalui IS-WARE NextGen dan WMS

Komoditi SRG Tak Terbatas Untuk Ketahanan Pangan Tapi Juga Komoditi Ekspor

Potensi Sistem Resi Gudang di Bangka Belitung dan Sumsel Sangat Besar

Kegiatan ini merupakan bentuk sinergi Bappebti Kementerian Perdagangan dengan KKP dalam mengoptimalkan pemanfaatan dan pengembangan SRG di sektor perikanan. Inisiasi pelaksanaan SRG ini merupakan hasil dukungan dari berbagai pihak terkait, seperti Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan perbankan.

Hadir pada acara tersebut Wakil Menteri Perdagangan Jerry Sambuaga, Direktur Utama PT Perikanan Nusantara (Persero) Farida Mokodompit, Sekretaris Jenderal Kementerian Perdagangan Suhanto, Direktur Jenderal Perdagangan Dalam Negeri Syailendra, Direktur Jenderal Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan KKP Artati Widiati, dan Kepala Disperindag Provinsi Bali I Wayan Jarta. "Pelepasan ekspor ikan tuna dari SRG ke Korea Selatan merupakan salah satu wujud komitmen pemerintah dalam mengoptimalkan manfaat SRG. Seperti yang telah diterapkan di sektor pertanian, pelaksanaan SRG perikanan diharapkan dapat memberikan alternatif solusi bagi para nelayan dalam menghadapi fluktuasi harga ikan dan keterbatasan akses pembiayaan," ujar Menteri Perdagangan Agus Suparmanto dalam siaran persnya.

Menteri Perdagangan mengatakan, sebagai negara maritim, sektor kelautan dan perikanan Indonesia memegang peranan yang penting dalam perekonomian nasional. Hingga saat ini, sektor perikanan masih memberikan kontribusi yang cukup besar bagi kinerja ekspor Indonesia. "Pandemi Covid-19 memberikan tekanan bagi para pelaku usaha, khususnya bidang pertanian, peternakan, perkebunan, dan perikanan. Adanya SRG memberikan alternatif solusi salah satunya yang menyangkut permasalahan keuangan pelaku usaha dalam melakukan penyerapan komoditas dari produsen saat terjadi penurunan permintaan barang di dalam dan luar negeri," ujar Mendag Agus.

Sementara Kepala Bappebti, Sidharta Utama, menjelaskan pelaku usaha pengolahan dan perdagangan sektor perikanan dapat memanfaatkan skema SRG sebagai instrumen pembiayaan usaha untuk mendukung penyerapan komoditi perikanan dari para nelayan. "Implementasi SRG yang semakin luas dengan berbagai komoditas, seperti perikanan, akan membawa manfaat besar bagi perekonomian nasional, terutama dalam rangka pemulihan ekonomi nasional yang terdampak Covid-19," ujar Sidharta Utama.

Direktur Jenderal Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan KKP, Artati Widiati, mengungkapkan, langkah ini merupakan upaya pemerintah menjaga nelayan dan pembudidaya dapat mempertahankan kelangsungan bisnis perikanannya, khususnya di masa pandemi Covid-19. Sementara Direktur Utama PT Perikanan Nusantara (Perinus) (Persero) Farida Mokodompit menambahkan, PT Perinus mendorong implementasi SRG sebagai skema penyimpanan stok, tunda jual, dan untuk memperoleh pembiayaan usaha dari Lembaga Pengelola Modal Usaha Kelautan dan Perikanan (LPMUKP) KKP. Sehingga, para nelayan masih memiliki modal untuk kembali melaut. (ivan)